



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 Seri D Nomor 9), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 55 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Setda Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Setda merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekda, yang bertanggungjawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Setda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, Setda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;

- c. penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setda adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
    - 1. Asisten Administrasi Pemerintahan;
    - 2. Asisten Administrasi Pembangunan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing susunan organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
      - c) Sub Bagian Keagrarian.
    - 2. Bagian Hukum dan HAM yang terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Produk Hukum;
      - b) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
      - c) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
    - 3. Bagian Umum, yang terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha;
      - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan;
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
    - 4. Bagian Organisasi, yang terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Tatalaksana.
  - b. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
    - 1. Bagian Perekonomian, yang terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Produksi dan Distribusi;
      - b) Sub Bagian Dunia Usaha dan Perbankan;
      - c) Sub Bagian Ketahanan Pangan.

2. Bagian Pembangunan, yang terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program Pembangunan;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Sosial;
    - b) Sub Bagian Ketenagakerjaan, Gender, Kepemudaan dan Keolahragaan;
    - c) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Bagian Hubungan Masyarakat, yang terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa;
    - b) Sub Bagian Dokumentasi.
- (3) Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1,2 dan 3 dan 4 huruf b angka 1, 2 , 3 dan 4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b angka 1, 2, 3, 4, huruf a), b) dan c) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian masing-masing.

Bagian kedua  
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Setda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Setda yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi Setda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV TATAKERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Setda maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Setda bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Setda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekda melalui Asisten.

- (5) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Setda yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Setda diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Setda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 8 seri D Nomor 9) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi, dan Tatakerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 8 seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi, dan Tatakerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 8 seri D Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 13 Tanggal 10 Nopember 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Oktober 2005

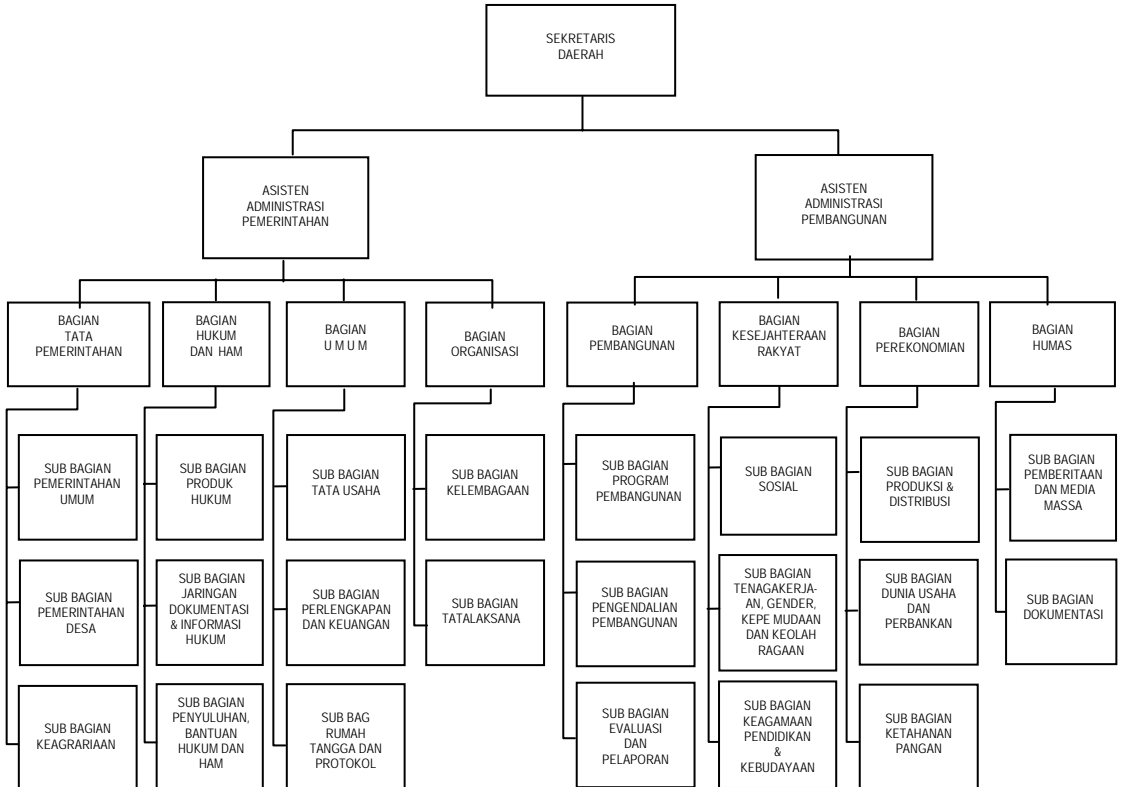
BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2005  
TANGGAL 26 Oktober 2005

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah ( sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan ), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :  
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.  
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
- c. Menerapkan strategi " Learning Organization "(Organisasi Pembelajaran)  
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ada. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Seri D Nomor 9), masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Pasal 1          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 2          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 3          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 4          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 5          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 6          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 7          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 8 Ayat (2) | : | yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan. |

Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.